

## **GAGASAN ACEH BARU: PEMBENTUKAN IDENTITAS ACEH DARI DALAM REAKTUALISASI RUANG PUBLIK BAGI AKSI PENGELOLAAN KEARIFAN LOKAL PASCA-KONFLIK DAN TSUNAMI**

*Ibnu Mujib*

Program Studi Agama dan Lintas Budaya  
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada  
Email: [ibnu\\_mujib78@yahoo.com](mailto:ibnu_mujib78@yahoo.com)

*Irwan Abdullah*

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

*Heru Nugroho*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

### **ABSTRACT**

This paper quests the new Acehness identity that inspiring lokal revival in Aceh. Two important things that would support the thesis how the ideas of new Aceh or Aceh revival are formulated from within? At least, the strengthening of public space as a local knowledge base management becomes an important discourse in the course of the indicator measuring the local revival in Aceh. In addition, the process of formation of Acehnese identity is also one of the research questions of this paper, in which this practice has marked the end of a local revival is being formulated in Aceh. Therefore, the questions about the process of dialogue and negotiation as what is growth in Aceh recently, will be discussed in this research. This research shows that the reactualization of public spaces that has been sunk by the conflict or the tsunami, now it is resurrected to turn the social bases that have been lost and even blurred. Whail, local wisdom and its discourse had reached the implementation of the policy through a qonun as a form of maintenance an intellectual heritage of Aceh to be kept alive and implemented. Communal consciousness constructed by the fact that many of these actors have been integrated through various forms of dialogue and long negotiation. So don't be surprised if the recent in-*meunasah*, *gampong* or village activities turn on the mosque as a center of Islamic studies, and even coffee shops also determine the direction of Acehnese identity is being created, especially as the idea of Aceh revival.

*Keywords: Acehnese identity, social space, local wisdom, Aceh revival, dialogue and negotiation*

### **ABSTRAK**

Paper ini mempertanyakan tentang wujud Aceh baru yang menjadi inspirasi kebangkitan lokal di Aceh. Dua hal penting yang akan mendukung tesis bagaimana gagasan Aceh baru/kebangkitan Aceh dirumuskan dari dalam. Setidaknya penguatan ruang publik sebagai basis pengelolaan kearifan lokal menjadi wacana penting dalam mengukur indikator berlangsungnya kebangkitan lokal di Aceh. Selain itu, proses pembentukan identitas keacehan juga menjadi salah satu pertanyaan penulisan paper ini, di mana praktinya telah menandai ujung dari kebangkitan lokal yang sedang dirumuskan di Aceh.

Oleh karena itu, proses-proses dialog, maupun negosiasi seperti apa yang berkembang di Aceh akan dibahas dalam penulisan ini. Studi ini menunjukkan bahwa reaktualisasi ruang-ruang publik yang selama ini tenggelam oleh karena konflik dan tsunami, kini dibangkitkan kembali untuk menghidupkan basis-basis sosial yang telah hilang dan bahkan mengabur. Kearifan lokal wacananya sudah sampai penerapan kebijakan melalui qonun sebagai bentuk pemeliharaan warisan intelektual Aceh yang harus terus dihidupkan dan diimplementasikan. Kesadaran komunal yang dibangun oleh banyak aktor ini faktanya telah terintegrasi melalui berbagai bentuk dialog dan negosiasi yang panjang. Sehingga tidak heran jika belakangan ini di meunasah-meunasah, aktivitas-aktivitas gampong, menghidupkan mesjid sebagai pusat kajian islam, bahkan warung kopi pun menentukan arah identitas keacehan yang sedang dibangun, terutama sebagai gagasan aceh bangkit.

*Kata Kunci: Identitas Aceh, Ruang sosial, Kearifan lokal, Kebangkitan Aceh, Dialog dan negosiasi.*

## PENGANTAR

Aceh sebagai icon perluasan globalisasi di ranah lokal hampir dapat disebut sebagai desa global yang dinamis. Masuknya kultur global di Aceh seharusnya bukan menjadi "rapor merah" bagi perkembangan kebudayaan dan pengetahuan lokal (Geertz 1983), tetapi ia setidaknya mampu mendefinisikan dirinya dalam konteks usaha memperkuat identitas lokal yang dinamis. Akan tetapi, ternyata pola-pola konfrontatif pertemuan dua identitas "lokal dan global" kini berlangsung dengan kritis dan tampak berhadapan-hadapan (Woodward, 1997. 84). Tidak saja itu, meluasnya globalisasi di Aceh dalam tahun-tahun belakangan juga ikut mendukung dialektika lokal dan global di Aceh secara lebih intensif dan sistematis. Terlepas dari interaksi lokal-global yang demikian intens ini, pertemuan keduanya telah memberi pelajaran berharga bagi masyarakat lokal, tidak saja dalam bidang ekonomi-politik dan keamanan, tetapi di bidang sosial-budaya juga (Friedmen, 1991: 134).

Pemandangan penting belakangan ini di Aceh, seperti praktik-praktik kekerasan pada perempuan, penyesatan atas pandangan maupun aliran lembaga keagamaan tertentu, munculnya beragam aliran Islam merupakan bias yang sesekali perlu dibaca lewat pemahaman-pemahaman politik dan kekuasaan karena bentuk-bentuk konstruksi sosial semacam ini yang dapat menjelaskan secara lebih terbuka tentang persoalan ini, termasuk konstruksi negara atas penerapan Syariat Islam di Aceh (Bustamam-ahmad, 2009: 31).

Persepsi suatu kelompok di dalam masyarakat heterogen akan melahirkan batas-batas atau teritori identitas bagi kelompok yang lain (Cohen, 2000:1-2). Oleh karena itu, peluang konflik akan menjadi lebih terbuka pada saat berbagai bentuk persepsi muncul secara masif, menjustifikasi kelompok yang lain, dan belum lagi jika malah memunculkan klaim-klaim yang sengaja direproduksi secara terus menerus tanpa ada klarifikasi yang diciptakan secara lebih populer. Sejalan dengan itu, belajar memahami identitas kelompok yang lain adalah bagian yang penting untuk menghilangkan persepsi negatif (Appadurai, 1994: 101) dengan cara menumbuhkembangkan tradisi dialog di berbagai struktur lapisan antarkomunitas, diversitas budaya, maupun bahkan antar-partai-partai politik melalui penguatan dan reaktualisasi ruang-ruang publik di Aceh.

Di Aceh dapat diidentifikasi berbagai peluang dialog yang perlu ditunjukkan. Salah satunya adalah hubungan *state* dan ulama yang seharusnya memiliki peran penting dalam merekonstruksi "pembangunan" Aceh, tetapi kini hubungan keduanya tidak tampak sebagai suatu aktor penting yang mampu menegosiasikan antar-diversitas kelompok sosial, bahkan yang terjadi adalah posisi itu telah tergantikan oleh aktor dan agensi yang lain. Peluang negosiasi dalam berbagai kebijakan lokal banyak membutuhkan peran-peran tradisional dalam memelihara nilai-nilai dan kearifan lokal Aceh, tetapi yang terjadi malah ulama sebagai referensi ketokohan masyarakat Aceh

fungsinya semakin memudar. Sementara *state* tidak mampu memahami dunia lokal secara lebih terbuka, sehingga hasil kebijakan yang diciptakan terkadang berbenturan dengan semangat kewargaan lokal, yaitu harapan yang paling esensial dari masyarakat lokal. Selain *state* dan ulama, masih banyak potensi lain di Aceh yang dapat menjadi ajang kontestasi antar-aktor dan agensi dalam merepresentasi dan memberi ruang bagi terbukanya dialog di antara keragaman yang ada, seperti mengaktifkan kembali aktivitas-aktivitas *Gampong*, begitu juga *Meunasah*, *Dayah*, lembaga-lembaga adat, LSM lokal, termasuk juga ruang budaya seperti "Warung kopi" di Aceh menjadi penting diidentifikasi sebagai peluang ruang publik yang dinamis.

Apa yang terjadi di Aceh belakangan ini, baik konflik yang disebabkan oleh faktor ekonomi politik --bentuk baru konflik Aceh--, meluasnya apa yang disebut dengan disorientasi nilai-nilai dan identitas Aceh menyebabkan anutan-anutan sistem tradisional memudar, selain diakibatkan oleh mobilitas internasional yang terjadi di Aceh pasca-tsunami juga bagian integral dari suatu perubahan sosial di Aceh atau apa yang oleh Abdullah disebut deterritorialisasi budaya (Abdullah, 2006: 136). Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi dalam transformasi masyarakat Aceh semacam ini adalah suatu konteks pengelolaan identitas lokal yang tidak dibentuk oleh agen tunggal, tetapi oleh berbagai agen dengan kepentingan yang berbeda-beda. Hadirnya berbagai institusi, baik NGO, lembaga pemerintah, baik lokal maupun internasional merupakan contoh nyata beragamnya agen yang terlibat dalam proses pemaknaan sebuah nilai-nilai yang diciptakan di Aceh. Inilah yang oleh Schutz dalam studi identitas disebut *intersubjectivity* (Schutz, 1967:31-32).

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana identitas lokal Aceh yang sedang menjadi ajang kontestasi berbagai agensi ini telah direproduksi dan menjadi nilai anutan yang berpihak pada kearifan lokal masyarakat Aceh, khususnya nilai-nilai keislaman Aceh yang telah lama menjadi

ideologi kerakyatan (*popular ideology*) bagi masyarakatnya (Ali, 2006: 4). Oleh karena itu, studi ini selanjutnya akan menakar kekuatan dan potensi ruang publik di Aceh untuk sebuah implementasi kearifan lokal dan sekaligus identitas lokal yang kini perkembangannya sedang disandera oleh kekuatan-kekuatan global, aktor serta agensi termasuk masyarakat, negara, dan pasar.

## PEMBAHASAN

### Aceh Pasca-Konflik dan Tsunami

Era kebebasan dan keterbukaan pasca konflik dan tsunami Aceh merupakan simbol bagi identitas baru masyarakat Aceh, sekaligus indikator penanda terjadinya pergeseran pada ranah suprastruktur, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai ke-Aceh-an yang kini sedang menemui masa disorientasi. Berbagai bentuk struktur nilai-nilai tradisional, keagamaan, keadatan, hingga pada sub-kultur masyarakat Aceh kini sedang mengalami redefinisi atau apa yang kerap kali disebut mengalami transformasi secara meluas. Kebebasan pasca-konflik juga dipahami sebagai pembudayaan nilai baru yang terkadang berhadapan-hadapan dengan nilai-nilai asli (*indigenius values*).

Tantangan nyata pada era global di Aceh adalah semakin kompleksnya berbagai bidang kehidupan karena adanya teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang membawa pengaruh terhadap berbagai nilai dan wawasan masyarakat akan dunia global secara umum. Tantangan global yang dihadapi masyarakat Aceh dapat dirumuskan dalam studi ini antara lain: *pertama*, sikap individualisme yaitu munculnya kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan bersama, memudahkan solidaritas, dan kesetiakawanan sosial, musyawarah mufakat, gotong royong, dan sebagainya. *Kedua*, sumber referensi ketokohan generasi muda tidak lagi kepada para pejuang, ulama, dan jati diri bangsanya yang memiliki peran penting bagi sebuah nasionalisme kelokalan/kebangsaan, melainkan bergeser pada lebih mengenal dan mengidolakan artis, bintang film, dan pemain

sepak bola asing yang ditiru dengan segala macam aksesorisnya. *Ketiga*, banyaknya masyarakat yang sudah acuh tak acuh terhadap ideologi atau falsafah negaranya, bahkan kesukuannya. Mereka sudah tidak tertarik lagi menjadikannya sebagai sumber anutan, bahkan lebih cenderung bersifat kritis dengan cara membanding-bandingkan dengan ideologi lain yang dianggap lebih baik dan tepat. *Keempat*, adanya diversifikasi masyarakat, yaitu munculnya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi tertentu yang terus berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional. *Kelima*, keterbukaan yang lebih tinggi, yaitu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan, pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan dialogis, demokratisasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Kelima tanda perubahan sosial di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kontemporer saat ini. Tidak saja berlangsung pada ranah generasi mudanya, melainkan juga generasi aktif yang masih mengikuti perkembangan-perkembangan modernitas. Terlepas dari siapa yang menjadi pelaku sejarah dalam perubahan sosial belakangan ini di Aceh, paling tidak bahwa bias perubahan itu juga dapat dilihat dalam praktik-praktik masyarakat sebagai berikut; *fashion* anak muda perempuan Aceh misalnya, praktik komodifikasi semacam ini juga bagian dari dampak yang diakibatkan oleh meluasnya globalisasi di Aceh. Selain itu, tradisi silaturahmi tatap muka dengan berkunjung kepada famili yang menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya misalnya harus digantikan dengan keberadaan handphone, facebook, twitter, dan lain-lain yang kahadirannya mau tidak mau telah dipaksakan oleh suatu keadaan. Keadaan yang demikian inilah menyebabkan nilai-nilai tradisional yang muncul sebagai bentuk identitas lokal masyarakat akan mengalami deterritorialisasi (Abdullah, 2006:136), yaitu mengaburnya identitas lokal yang disebabkan

oleh meluasnya kultur global, yaitu para mengendali kapital yang berkembang sampai detik ini di Aceh.

Tanda dari sebuah gejala sosial di atas, disadari atau tidak, persoalannya akan menjadi krusial ketika berlawanan dengan nilai-nilai lokal yang telah terbangun lama dan berlangsung di dalam suatu masyarakat Aceh. Bahkan, demikian ini dapat muncul secara meluas manakala *pertama*, sistem dan kontrol sosial dalam masyarakat mulai melemah; *kedua*, tidak adanya suatu kekuatan dari dalam yang menginisiasi bentuk-bentuk revitalisasi nilai-nilai lokal; *ketiga*, tidak berfungsinya ruang-ruang publik secara maksimal sehingga kegunaannya justru dimanfaatkan oleh produk-produk kapital yang menghiiasi praktik sosial masyarakat Aceh belakangan ini secara meluas; *keempat*, nilai tawar masyarakat rendah sehingga negosiasi identitas yang dilakukan juga sangat terbatas; *kelima*, terlepas dari keempat persoalan di atas, maka harus diakui bahwa globalisasi tidak saja menawarkan produk-produk global, melainkan ia juga mengajari masyarakat akan kemerdekaan individu dan itu artinya sebuah pembelajaran dalam mengelola kearifan lokal.

Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana masyarakat Aceh mengambil peluang atas keberadaan globalisasi di tengah masa-masa krisis ini. Gejala ini ditandai dengan dua momentum penting di Aceh sejak 9-10 tahun terakhir yaitu momentum perdamaian Aceh dan tsunami. Terutama pada saat globalisasi mendiami masa-masa berpeluang yaitu masa kemerdekaan berbudaya dan kemerdekaan berpolitik bagi masyarakat Aceh.

### **Reaktualisasi Ruang Publik: Gagasan Aksi dari Dalam**

Salah satu sumbangan teoritis penting dalam diskursus ruang publik adalah pandangan yang dikenalkan oleh Jurgen Habermas, ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat

menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif (Hardiman, 2010: 28-29). Ruang publik merupakan syarat penting dalam demokrasi. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah (Hardiman, 2009:7). Ruang publik bukan hanya sekedar fisik, maksudnya sebuah institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi warga itu sendiri. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan, dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya (Hardiman, 2010:128). Ruang publik masih pesan Habermas itu harus mudah diakses semua orang. Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk melawan mesin-mesin pasar/kapitalis dan mesin-mesin politik.

Habermas membagi-bagi ruang publik, tempat para aktor-aktor masyarakat warga membangun ruang publik, Pluralitas (keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela, dan seterusnya), publisitas (media massa, institusi-institusi kultural, dan seterusnya), keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral), legalitas (struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar) (Hardiman, 2009: 28). Ruang publik bukan hanya ada satu, tetapi ada banyak ruang publik di tengah-tengah masyarakat warga dan tidak dapat membatasi ruang publik, ruang publik ada di mana saja (Hardiman, 2010: 29). Praktiknya ada masyarakat yang duduk berkumpul bersama dan berdiskusi tentang tema-tema yang relevan, maka disitu hadir ruang publik. Selain itu, ruang publik tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun politik sehingga ruang publik tidak terbatas.

Ruang publik pun diartikan sebagai ruang di mana anggota masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya

terhadap semua kegiatan publik, masyarakat berhak melakukan secara merdeka didalamnya termasuk mengembangkan wacana publik seperti menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis (A.S. Culla,1999:123). Ruang publik adalah ruang atau lahan umum tempat masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik itu kegiatan sehari-hari ataupun berkala (Carr, 1992).

Ruang publik juga merupakan entitas ruang yang memiliki nilai historisitas, komunalitas, serta bahkan solidaritas personal bagi pemilikinya, ia akan menjadi cair, longgar dan bahkan sangat strategis karena ia terus menerus direproduksi bersama melalui ikatan-ikatan antar-personal baik makna dan fungsinya, sehingga tidak heran jika kemudian ruang publik menjadi ruang bersama dalam identitas, budaya, sampai bahkan kepentingan yang berbeda. Batas-batas kebudayaan tampak mencair, berbagai bentuk negosiasi, penyelesaian konflik, transaksi bisnis, dan juga termasuk konsolidasi kelompok, partai sekalipun dapat diselesaikan di dalam ruang kebudayaan semacam ini. Yang demikian itu, relatif mampu dilakukan tidak saja dalam ruang-ruang formal, tetapi lebih sebagai kerangka informal yang mungkin akan menjadi aset baru bagi tumbuhnya potret kearifan lokal yang penting bagi kehidupan masyarakat Aceh (Brubaker, 2004: 67).

Kearifan lokal yang dibangun sebagai ideologi budaya di Aceh, membutuhkan simbol-simbol identitas yang tentunya tidak saja diterima oleh masyarakat Aceh dengan berbagai konsensus moral yang diciptakan, tetapi juga mampu menjembatani keragaman yang datang dari berbagai subkultur yang berkembang di Aceh. Jika dilihat dari akar historis kulturalnya, selain *meunasah*, *mukim*, *gampong*, *mesjid*, tetapi juga bahkan warung kopi di Aceh misalnya bukan tidak mungkin muncul sekedar pengganti hiburan, tempat nongkrong, serta tempat berbagi informasi bagi orang-orang Aceh (Kompas, 2011:

Mei). Proses yang demikian natural inilah, kemudian di setiap ruangnya melahirkan bentuk-bentuk komunitas bersama yaitu apa yang dalam studi identitas disebut "*komunitas hoby*" (*community of interest*) yang kokoh di Aceh (Abdullah, 2006: 136-137). Oleh karena itu, proses budaya yang berkembang demikian natural ini harus dihargai sebagai narasi budaya yang memiliki peran penting bagi transformasi ruang yang kini sedang menggejala di tanah rencong ini.

Bentuk-bentuk *public space* semacam ini, disadari atau tidak telah menjadi tanda yang mengukuhkan sebuah identitas baru (Edelmen, 2001: 201), melalui bertemunya beragam orang, lembaga, status sosial, dan bahkan identitas yang multikultur sekalipun. Pada tingkat pergeseran mode seperti ini, penciptaan narasi kebudayaan yang melintasi batas-batas teritori kebudayaan Aceh, misalnya di satu sisi, warung kopi mampu menjadi perekat budaya yang dapat diterima oleh berbagai tingkat sosial yang berbeda. Akan tetapi, di sisi yang lain, bentuk-bentuk penciptaan ruang publik semacam ini juga bagian dari proses perubahan eskalasi budaya yang kini mulai merangkak pada pencarian identitas baru, khususnya pada generasi paling aktif yaitu anak muda kota Aceh. Sejalan dengan itu, tahap ini harus dibarengi dengan bentuk-bentuk pembacaan gejala perubahan kebudayaan secara lebih kritis.

Selain warung kopi, *meunasah* dan *mesjid* misalnya, keduanya juga memiliki peran kebudayaan yang tidak kalah pentingnya terutama dalam menjawab tantangan global ini. Di Aceh Hubungan *meunasah* dengan *mesjid* dalam patron simbol budaya adat Aceh, telah dimaknai dengan narit maja (*hadih maja*) "*Agama ngon Adat (hukom), lagei dzat ngon sifeut*". *Meunasah* adalah sentral pengendali proses interaksi sosial masyarakat karena saling membutuhkan kesejahteraan sesama manusia dalam komunitas *gampong* (antar-*gampong*), sehingga melahirkan adat, adat istiadat dan tatanan adat. *Meunasah* sangat terikat dengan kehidupan *gampong*, karena *gampong* sendiri merupakan

unit persekutuan masyarakat hukum yang menurut Van Vallenhoven dapat dimanfaatkan untuk mengetahui hukum, menyelidiki sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana dalam kehidupan sehari-hari orang-orang dikuasai oleh hukum. Persekutuan merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materil maupun kekayaan immateril (Wignjodipuro, 1979: 85-86).

Sementara *mesjid* (*mesjid*) dilahirkan oleh kebutuhan mukim (beberapa *gampong*), karena kebutuhan nilai-nilai aqidah/syariat, terutama shalat Jum`at. Sejarah mukim tumbuh dalam konteks diperlukan 40 orang untuk mendirikan shalat Jum`at (S.Hurgronje, 1985: 91). Dengan demikian, peran *mesjid* adalah syariat, sedangkan peran *meunasah* adalah adat yang saling bersentuhan (siklus dakwah/komunikatif) yang kemudian melahirkan suatu paduan sikap perilaku (kebersihan adat dilakukan oleh agama (*mesjid*) dan kekuatan tegaknya agama dikokohkan dengan adat (*meunasah*). Kontribusi peran *meunasah* dan *mesjid* dalam kehidupan sosial budaya adat Aceh, telah memperkokoh otoritas dan otonomitas dua kawasan tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kawasan *gampong* dan mukim. Oleh karena itu, *Gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh *keuchik* dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. *Keuchik* adalah Kepala Badan Eksekutif *gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong* (Qanun No.5:2003). *Keuchik* memegang fungsi *Mono Trias Function* (manunggal tiga fungsi: eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang dibantu oleh Tuha Peut (A.J.Vleer/PDIA, 1978: 1-4) dan Imeum *Meunasah*, beserta sekretaris *gampong* sebagai perangkat *gampong* (Badruzzaman: 2002: 34).

Terlepas dari peran normatifnya, *meunasah* misalnya juga harus dilihat sebagai

bagian dari subkultur yang mempertemukan berbagai budaya dan identitas baru. Dapat dibayangkan, munculnya kultur global (*global culture*) yang meluas di Aceh, secara pelan tetapi pasti telah membentuk orientasi, mentalitas, gaya hidup (Harris, 1997: 112), Bahkan terbentuknya struktur sejarah baru yang akan membawa masyarakat Aceh larut pada simbol-simbol politik kebudayaan semacam ini, sehingga tidak heran jika ruang publik semacam ini, pada saatnya menjadi agen baru bagi tumbuhnya budaya keterbukaan (*cultural open minded*) di Aceh, setelah lama larut dalam jeratan konflik yang bertahun-tahun membebani kecerdasan lokal masyarakat Aceh. Dengan demikian, ia juga harus dimanfaatkan sebagai ruang budaya yang produktif dan memberi semangat inovasi bagi kecerdasan-kecerdasan lokal yang lain.

Sebagai bentuk ruang kebebasan dan keterbukaan di Aceh, meunasah juga pada saatnya melahirkan apa yang disebut dengan munculnya "politik ruang", di mana ruang publik seperti ini pada gilirannya juga menjadi ajang kontestasi kekuasaan di Aceh. Pemanfaatan ruang kebudayaan seperti ini juga dapat dilihat melalui beberapa hal penting sebagai penanda proses perubahan di Aceh sebagai berikut: *pertama*, *meunasah* telah menegaskan identitas (Friedmen, 1995) keacehan baru, meski dulunya juga telah menjadi pola kebudayaan yang mengakar, tetapi pada konteks pasca konflik dan pembangunan Aceh, kini *meunasah* karakternya telah semakin mangakar secara kuat. Hal ini menunjukkan bahwa identitas keacehan mulai bergeser ke arah subkultur yang produktif dan harus dikembangkan dan dikelola menjadi media komunikasi yang lebih punya nilai tawar kebudayaan.

*Kedua*, *meunasah* telah memperluas ruang kebudayaan (*cultural space*) (Appadurai, 1994: 193) di Aceh. Masuknya kultur global pasca tsunami juga telah menandai berbagai warisan perubahan di berbagai tingkat, mulai dari gaya hidup, pandangan hidup, mentalitas, imajinasi, bahkan meterialisasi nilai-nilai telah meluas

di jantung kehidupan masyarakat Aceh. Hal yang paling mencolok untuk menggambarkan pola ini adalah ketika hampir sebagian besar NGO nasional maupun internasional sudah mulai *kukut* dari proses pembangunan Aceh, akibat yang ditimbulkannya juga membawa dampak yang tidak ringan bagi perubahan masyarakatnya, seperti pada ketergantungan yang mulai berpengaruh pada aspek mentalitas orang Aceh, konsumtifisme mulai mengakar pada ranah anak muda kota Aceh, pengangguran yang juga mulai meluas di berbagai tingkat di kota maupun di pedesaan Aceh.

Fakta ini menunjukkan bahwa ruang kebudayaan Aceh tidak saja diciptakan oleh masyarakat Aceh sendiri, tetapi ia juga bagian yang ditimbulkan oleh akibat meluasnya kultur global atau dalam studi identitas disebut sebagai pihak luar yang konstitutif (Hall, 1996: 4) yang sengaja atau tidak telah melebar pada ruang-ruang kebudayaan semacam ini. Oleh karena itu, tidak heran jika *meunasah* pada suatu saat dipilih dan secara tidak langsung menggantikan ruang-ruang "kebudayaan induk" yang telah mapan sebelumnya karena menurut Amartya Sen teoritikus identitas budaya asal Jepang menegaskan bahwa identitas merupakan pilihan-pilihan (Sen, 2006: 30). Keberadaannya bahkan telah menjadi bagian yang tidak saja menjadi sebuah pusat komunikasi masyarakat, tetapi ia telah memperlihatkan karakteristik kebudayaan yang mampu mendominasi akar kebudayaan yang lain di negeri syariah ini.

*Ketiga*, selain *meunasah* telah memperluas ruang kebudayaan, ia pada saatnya juga akan menjadi model bagi tempat bertemunya diversitas budaya (Green, 1995: 35) khususnya pada perkembangan kebudayaan yang sedang mengalami masa transisi panjang seperti Aceh. Bentuk-bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) semacam ini tidak dapat kita temukan dan kita bentuk dengan mudah di tempat lain. Sebab supporting sistem yang berlaku di setiap ruang budaya tidak selalu memiliki karakter yang sama, sehingga setidaknya karakteristik

mendasar dari sebuah pola perilaku, baik individu, kelembagaan, simbol-simbol budaya, nilai-nilai, hingga bahkan pilihan-pilihan hidup yang dibangun seharusnya memiliki kemiripan (Fatherstone, 1995). Dengan demikian, berbagai bentuk aktivitas di *meunasah* telah menjadi tempat rujukan yang memiliki nilai historis kultural di Aceh, bahkan nantinya akan menjadi *jujukan* tidak saja pejabat daerah atau terbatas pada individu-individu masyarakat Aceh, tetapi juga para elit partai lokal-nasional, intelektual, penulis, bahkan akademisi.

Oleh karena itu, meski kehadirannya tidak menegaskan sebuah pesan atau misi tertentu, tetapi pada saatnya mau tidak mau, ruang publik semacam ini akan mengalami redifinisi yang terus menerus sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan global yang mengikutinya (Friedman, 1994:81). Apa yang disebut dengan politik ruang --di dalam kacamata antropologi politik-- bahkan juga akan terjadi di ruang-ruang sosial semacam ini. *Meunasah* yang dibangun dengan akar dan karakteristik lokal, pada saatnya akan diisi dan digantikan oleh suatu ruang budaya yang bahkan mendukung suatu pola hubungan kekuasaan yang berkembang, sehingga pada saat tertentu *meunasah* akan dibangun, dipelihara, dilestarikan, bahkan diubah menurut selera politik kebudayaan yang berkembang untuk menjamin kelestarian sebuah kelompok elit yang sedang berkuasa.

Sebagai sebuah ruang budaya, *meunasah* harus didudukkan sebagai narasi kebudayaan yang akan selalu mengalami pergeseran orientasi sekaligus maknanya (Hall, 1996:6). Untuk itu, perlu pemahaman yang lebih kritis dalam melihat gejala transformasi ruang semacam ini. Terlebih tahun-tahun belakangan ini merupakan momentum kompetisi politik pada aras lokal yang sedang bersaing ketat. Sejalan dengan itu, dengan berkembangnya ruang sosial-budaya seperti *meunasah* atau disebut *public space* di Aceh dalam studi ini, diharapkan akan mengembalikan nilai-nilai keacehan yang telah mulai menghilang, ikatan-ikatan

tradisional yang melemah, termasuk pada referensi ketokohan yang mulai hilang dapat ditemukan kembali.

Oleh karena itu, bisa dibayangkan sebuah resistensi orang Aceh ketika proses enkulturasi tidak lagi didominasi oleh agen-agen tradisional seperti orang tua, pemimpin agama, dan adat. Proses konstruksi nilai yang demikian ini, telah dilakukan dengan cara yang sangat kompetitif oleh beragam agen yang berbeda (Abdullah, 2007), mulai dari agen negara, pasar, dan masyarakat sendiri. Di mana seharusnya lebih menentukan pola anutan yang dikembangkan sebagai narasi yang diciptakan melalui *local genius* masyarakat Aceh. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk-bentuk *public space* seperti *meunasah*, mesjid, *gampong*, *dayah*, bahkan warung kopi dapat dikelola menjadi agen perubahan budaya yang mampu mengembalikan Aceh dari masa-masa krisis semacam ini.

Pada batas yang demikian itu, tidak heran jika belakangan ini ada persoalan krusial yang penting untuk dicermati yang melibatkan persoalan ekonomi politik, serta sosial budaya sebagai berikut:

“terjadi antara salah satu anggota dewan dengan mahasiswa. Saat sekelompok mahasiswa yang berasal dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Pantai Barat Selatan (FPMP-BAS) dan Forum Bersama Mahasiswa Poros Leuser (FBMP Leuser) yang datang ke DPRA, mengaku tidak begitu lancar dalam bahasa Aceh sehingga meminta agar komunikasi dengan salah satu anggota dewan tersebut dilakukan dalam bahasa Indonesia. Namun, anggota dewan tersebut menolak dan menyebut para demonstran sebagai demonstran yang tidak jelas, bukan orang Aceh.

(Harian Aceh 16/02/2011 dan 18/02/2011)”.

Persoalan yang demikian ini tidak saja menjelaskan perdebatan soal identitas ke-Aceh-an, juga bukan pula tidak hanya menyangkut pluralitas etnis di Aceh, tetapi juga menyangkut persoalan nasionalisme dan kebangsaan yang mestinya direspon secara kritis.



Oleh karena itu, hubungan dialektis antara identitas lokal dan global membawa beban historis yang beragam di Aceh. Benturan paradigma dalam mengelola diversitas kelompok di Aceh merupakan suatu fakta terbatasnya "ruang publik" yang diciptakan. Gesekan antar-aliran atau kelompok Islam baru-baru ini misalnya adalah suatu bagian kecil dari konflik identitas yang kurang mendapatkan sentuhan pengelolaan ruang publik secara maksimal, sehingga sampai-sampai identifikasi terhadap diversitas kelompok Islam tidak terbangun dengan efektif. Pada batas inilah sistem sosial suatu masyarakat tengah mengalami disfungsi sosial yang tidak lain sebagai akibat dari kluster-kluster sosial yang tumbuh secara masif dan dalam pengelolaan ruang publik yang terbatas (Hall, 2003: 97). Oleh karena itu, pertumbuhan kelompok-kelompok Islam secara bebas itu harus dikelola dengan dihadapkannya ruang publik secara bersama-sama, sehingga seperti memanfaatkan ruang budaya, menciptakan ruang inklusivitas yang lebih terbuka, membuka batas-batas eksklusivitas dalam kelompok-kelompok sosial adalah bagian dari cara mengelola perbedaan diversitas kelompok yang ada. konsekuensinya tidak terlalu terburu-buru menggunakan standarisasi penyekatan bagi kelompok yang tidak sehaluan dengan pandangan *menstream*.

### **Aceh Baru Inspirasi untuk Kebangkitan Lokal: Identitas Aceh yang Dialogis dan Negosiatif**

Setelah mendiskusikan bagaimana ruang publik (*public space*) telah membangunkan Aceh dari tidur panjangnya akibat derita konflik dan tsunami yang sampai 10 tahun belakangan ini masih terasa dampaknya. Ruang publik yang dibangun dari akar kultural keacehan ini kemudian dihidupkan kembali dengan mengambil dukungan dari *cultural capital* Aceh yang ada. Selanjutnya bagaimana modal sosial yang dimiliki Aceh dapat ditransformasi ke dalam berbagai kemungkinan peluang-pelung strategis, di mana globalisasi didudukkan sebagai

partner kerja yang bersifat konstruktif, meski tetap dapat mengidentifikasi antara batas-batas budaya dari dalam maupun dari luar (Barth, 2000:23). Dengan demikian, globalisasi tidak saja secara liar beroperasi dalam mekanisme globalnya sendiri, tetapi ia juga harus tunduk pada aturan main lokal yang mau tidak mau keduanya harus bisa saling menyeimbangkan antara kultur, identitas, dan kepentingan masing-masing.

Aceh baru dapat didefinisikan sebagai suatu potret Aceh yang lebih baik, Aceh yang tidak lagi hidup dalam kungkungan konflik, penjajahan, Aceh yang sepi dari tekanaan-tekanan politik nasional maupun internasional, Aceh yang merdeka dari aspek budaya dan politik, Aceh yang identitasnya mampu berdaulat, tidak ditentukan oleh suatu kekuatan dari luar, tetapi dibentuk oleh kekuatan dari dalam, sampai Aceh yang lebih kondusif, aman, damai, dan berdaulat. Sebuah harapan dari dalam, bahkan faktanya hampir terwujud, dan telah menjadi inspirasi yang direproduksi secara terus menerus melalui penguatan basis-basis sosial Aceh, pemanfaatan ruang publik, serta ritual-ritual politik yang intensif telah mendorong terwujudnya kebangkitan lokal yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, kebangkitan lokal di Aceh yang digambarkan lewat perjuangan sejarah lokalitas maupun perjuangan untuk pembangunan Aceh di masa yang akan datang telah menjelaskan secara terbuka akan desain yang tidak saja berpikir masa depan, tetapi Aceh juga berpikir tentang masa lalu identitas lokal. Artinya konstruksi lokal menjadi penting dalam pembangunan Aceh kedepan. Mekanisme yang demikian ini sangat berbeda dengan model kebangkitan Aceh pada masa kerajaan /kasultanan awal. Hubungan antara lokal dan global tidak ditunjukkan secara dialogis, maupun negosiatif yang seimbang dengan saling mengangkat keseimbangan antara kultur, identitas, dan kepentingan. Akan tetapi, kebangkitan pada era kasultanan Aceh cenderung bersifat antagonis-konfrontatif yaitu diperlihatkan dengan bentuk-bentuk

perlawanan. Suatu contoh, ketika wilayah Aceh sudah merdeka penuh sebelum 1873, tetapi penentangan terhadap basis bangsa asing terus dilakukan, terutama bagaimana masa kesultanan Sultan Ali Mughayat Syah terhadap pelabuhan-pelabuhan di belahan utara Sumatra, yaitu Sultan yang pertama memerintah di Aceh dan yang pertama pula memeluk dan mengembangkan agama Islam. Aceh disatukan oleh sebuah dinasti muslim yang bertekad mengeliminasi intervensi asing. Kebangkitan Aceh justru terjadi ketika melakukan perlawanan terhadap invasi Portugis ke wilayah Aceh. Kepentingan perlawanan terhadap intervensi asing menjadi *raison d'être* bagi eksistensi kesultanan Aceh selama berabad-abad (Reid, 2006:113).

Oleh karena itu, kebangkitan Aceh pada gelombang ke dua ini justru diperlihatkan dengan cara-cara dialogis dan negosiatif dengan asing, seperti apa yang oleh Althusser disebut "titik interpelasi" dalam studi identitas, yaitu sebuah titik singgung antara subjek dengan keadaan diskursif yang melatarinya (Hall, 1996:6-7). Asing sebagai kekuatan global pada era ini menjadi partner yang dapat saling memajukan Aceh dari berbagai sisi kehidupan Aceh. Bidang ekonomi, sosial, budaya tentunya merupakan bidang yang berlahan-lahan mendapatkan tempat bagi kelangsungan proses negosiasi yang diciptakan. Selain itu, ada beberapa hal dibidik sebagai entitas yang sedang dihidupkan kembali di Aceh sebagai bentuk sinergi "lokal-global" yang layak diangkat kembali.

Beberapa hal secara rinci dapat disebutkan tentang modal sosial dan kultural Aceh, antara lain, (a) Apa yang disebut sebut sebagai kearifan lokal (*local wisdom*), (b) Selain kearifan lokal bisa juga disebutkan tentang aneka ragam ruang publik (*public space*) yang perannya sedang dihidupkan kembali di Aceh seperti muenasah, gampong, mesjid, bahkan ruang budaya warung kopi yang kini telah eksis dan ramai dikunjungi beragam orang, (c) Basis sosial (*social based*) yang dapat berupa kelembagaan-kelembagaan tradisional, seperti tokoh masyarakat, orang

tua, lembaga adat, ataupun lembaga agama juga merupakan bagian dari peta kekuatan identitas Aceh yang tidak dapat dianggap remeh. Tiga kekuatan *civil society* Aceh ini disadari atau tidak telah membentuk akar kesejarahan yang kuat di Aceh, sehingga bangunan sosial dan kultural ini meskipun pernah mengalami keretakan pada saat konflik Aceh (Abdullah, 2007). Kini faktanya sedang dihidupkan dan dilekatkan kembali sebagai bentuk atau wujud Aceh baru, yaitu Aceh yang lebih baik dan bermartabat seperti ditegaskan oleh ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Banda Aceh:

"salah satu program MAA adalah melakukan advokasi gampong, di mana potret kehidupan asli Aceh masih dapat dilihat di sana, paling tidak belum banyak terkontaminasi oleh kehidupan global pasca tsunami. Seperti ritual-ritual gampong masih sering kita temukan di kehidupan gampong di Banda Aceh"  
(Wawancara dengan Ketua MAA Badruzzaman Ismail, 2009)

Sebagai sebuah kekuatan yang dirawat langsung oleh masyarakat atau *civil society* ini dapat menjadi kekuatan budaya yang berbasiskan kelembagaan masyarakat atau bahkan komunitas (Hall, 1991: 201, Ardana, 2004:31). Manajemen kelembagaan budaya semacam ini biasanya tidak terorganisir dengan rapi, tetapi kini di Aceh mulai dibangkitkan kembali melalui pelembagaan basis-basis sosial maupun budaya yang dirawat melalui qanun, yaitu misalnya Qanun: No. 9 tahun 2008 yang menjelaskan tentang pemformalan kearifan lokal dalam sebuah qanun (Bustamam-Ahamad, 2012: 23). Terlepas dari harapan yang termuat di dalamnya, ada kegelisahan akademis dalam proses qanunisasi kearifan lokal ini yaitu apakah dalam praktiknya kemudian kearifan lokal akan tetap mendapatkan pengakuan hukum seperti sebelum diformalkan dalam qanun? atukah pengakuan itu justru dapat melunturkan semangat kearifan masyarakatnya sendiri?

Pelembagaan basis-basis sosial budaya ini jika diamati lebih jauh, di satu sisi

memberikan keuntungan positif karena ia secara formal terjaga oleh suatu kekuatan hukum dalam bentuk qanun. Sebagai produk lokal, kearifan lokal akan tetap terpelihara baik dari keasliannya maupun dari status identitas keacehannya, sehingga tidak dapat dengan mudah daerah lain ikut mengklaim begitu saja tanpa dasar pijakan yang jelas. Di sisi lain, kearifan lokal membawa beban historis-kultural yang tidak semua orang dapat merasakan kelekatan kultural akan sebuah praktik sosial yang demikian penting ini. Oleh karena itu, pada batas tertentu basis-basis sosial Aceh perlu menunjukkan kepekaan yang lebih kritis, meski dalam kontestasi yang berlangsung tidak harus berhadapan-hadapan secara ketat dengan globalisasi.

Disadari atau tidak bahwa perkembangan Aceh tidak saja diciptakan oleh masyarakat Aceh sendiri, pelibatan global juga mewariskan pengembangan Aceh yang lebih efektif, cepat, dan bahkan strategis. Meski dalam batas yang lain globalisasi seringkali melewati batas-batas teritori kultural yang sudah ditentukan sebagai arena kontestasi dalam masyarakat (Cohen. 2000:2-3). Dengan demikian, apa yang menjadi komitmen dari awal dalam studi ini selalu ditekankan perlunya negosiasi identitas antara lokal dan global, di mana juga penting adanya formulasi-formulasi yang diciptakan kedua belah pihak agar menemukan keseimbangan antara kultur, identitas, dan kepentingan.

Sebuah pernyataan aktivis Komite Peralihan Aceh (KPA), Nazar yang menyatakan bahwa "kurikulum pengembangan masyarakat ke depan di Aceh harus berbasiskan lokal dengan juga memasukkan tema keislaman dan keacehan, di samping tema gerakan sosial baru, perdamaian, komunikasi publik, dan penguatan jejaring. Hal ini untuk mengantisipasi kerusakan Aceh yang lebih parah ke depan. Jangan sampai Aceh ke depan digadaikan oleh kelompok donatur yang tidak memedulikan adat istiadat dan agama di Aceh".

Pandangan senada juga muncul misalnya dari Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA), Teuku Kemal Fasya menyatakan

bahwa "hasil dari penulisan partisipatif para fasilitator di masyarakat pesisir memberikan sinyal bahwa masyarakat sudah cukup kritis dengan keberadaan NGO di Aceh. Jika dahulu masalah pembangunan ada pada kebijakan politik Orde Baru yang sentralistik, kini mengarah pada jaringan global bantuan yang dianggap merenggut keindahan gampong Aceh masa lampau. Masyarakat Aceh semakin rindu dengan romantika gampong Aceh yang permai dan seimbang secara kultural dan agama.

Setidaknya ada tiga kegelisahan publik yang dapat ditangkap dari pernyataan di atas sebagai berikut: (1) Kerinduan akan Aceh yang damai dan kondusif, tidak lagi ada konflik, apalagi konflik baru yang diciptakan melalui situasi yang tidak kondusif pasca tsunami. (2) Bahkan sebuah harapan kebangkitan Aceh yang tidak lagi dijajah oleh rezim apapun, termasuk para agensi global yang meraup kepentingan lewat jalur-jalur kapitalisme yang demikian ekstrem. (3) Sebuah perjuangan yang berpihak pada kecerdasan lokal. Hal ini tidak berarti kekuatan global tidak diizinkan menjamah pada ranah lokal, tetapi kecerdasan global harus beroperasi melalui mekanisme yang ditentukan oleh dan atas negosiasi di antara kekuatan-kekuatan berbagai pihak yang berkepentingan. Ketiga bentuk kegelisahan inilah yang kemudian menginspirasi pembantuan gagasan Aceh baru, sebagaimana yang saat ini sedang dibangkitkan kembali di Aceh.

Oleh karena itu, praktik negosiasi yang diciptakan, setidaknya mampu menggambarkan kecenderungan adanya keberpihakan global pada kekuatan-kekuatan lokal seperti bentuk-bentuk basis sosial dan kultural yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Begitu juga sebaliknya kekuatan-kekuatan lokal harus mampu menggambarkan dukungan penuh pada kekuatan-kekuatan global yang akan membangun bersama-sama menuju perubahan lokal yang dinamis dan mampu memberi akses selebar-lebarnya pada kedua kepentingan untuk sebuah perubahan lokal yang terus dilekatkan pada kedaulatan lokal, baik

berbasis pada adat istiadat, agama maupun, kearifan lokal.

## SIMPULAN

Keterlibatan beragam lembaga-lembaga donor pada saat pembangunan Aceh, institusi-institusi negara, dan bahkan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda baik budaya, agama, gaya hidup, ideologi, sampai pada tingkat perbedaan seseorang dalam praktik penggunaan barang-barang modern seperti barang-barang informatika dan teknologi, menunjukkan bahwa masyarakat telah secara sadar atau tidak sadar terlibat interaksi yang panjang di dalamnya, mulai dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-tsunami, proses perdamaian, sampai proses apa yang belakangan ini disebut pembangunan Aceh bangkit. Di sini lah apa yang oleh Berger dan Luckman (1966) disebut sebagai proses konstruksi identitas, mulai aspek-aspek subjektivasi, objektivasi, sampai pada internalisasi. Teori Berger dan Luckmann yang menjelaskan adanya pengaruh lingkungan sosial dalam pembentukan identitas telah diuji dalam praktik-praktik pembentukan identitas di Aceh.

Setidaknya ada tiga kegelisahan empiris penting yang menginspirasi kebangkitan Aceh. *Pertama*, kerinduan akan Aceh yang damai dan kondusif, tidak lagi ada konflik, apalagi konflik baru yang diciptakan melalui situasi yang tidak kondusif pasca tsunami. *Kedua*, harapan kolektif masyarakat Aceh yang tidak lagi ingin dijajah oleh rezim apapun, tekanan-tekanan politik, termasuk para agensi global yang meraup kepentingan lewat jalur-jalur kapitalisme yang demikian ekstrem. *Ketiga*, kurang adanya perjuangan bersama, sebuah perjuangan yang berpihak pada kecerdasan lokal. Hal ini tidak berarti kekuatan global tidak diizinkan menjamah pada ranah lokal, tetapi kecerdasan global harus beroperasi melalui mekanisme yang ditentukan oleh dan atas negosiasi di antara kekuatan-kekuatan berbagai pihak yang berkepentingan. Ketiga bentuk kegelisahan inilah yang kemudian menginspirasi pembantuan gagasan Aceh baru, sebagaimana yang saat ini sedang

dibangkitkan kembali di Aceh. Oleh karena itu, selanjutnya dibutuhkan rekomendasi-rekomendasi yang mengarah pada perjuangan aksi-aksi dari dalam yang akan terumuskan melalui isu reaktualisasi ruang publik dan transformasi identitas keacehan.

Reaktualisasi ruang-ruang publik di Aceh telah menjadi ajang kontestasi baru dalam arena kegiatan sosial-politik, budaya, serta ekonomi masyarakat lokal Aceh. Sebagai sebuah ruang budaya, *meunasah, gampong, dayah, mesjid*, serta bahkan warung kopi sekalipun harus didudukkan sebagai narasi kebudayaan yang akan selalu mengalami pergeseran orientasi sekaligus maknanya, baik ke arah ruang politik, ruang budaya, maupun ruang ekonomi. Sejalan dengan itu, dengan berkembangnya *meunasah* dan bentuk-bentuk ruang publik yang lain dalam studi ini, diharapkan akan mengembalikan nilai-nilai keacehan yang telah mulai menghilang, ikatan-ikatan tradisional yang melemah, termasuk pada referensi ketokohan yang mulai hilang dapat ditemukan kembali. Harapannya adalah bagaimana *meunasah, mesjid, gampong, dayah*, bahkan warung kopi dapat dikelola menjadi agen perubahan yang mampu mengembalikan Aceh dari masa-masa krisis semacam ini.

Transformasi identitas Aceh juga merupakan gerakan intelektual penting untuk dilakukan dalam membangun Aceh yang lebih baik, berdaulat dan bermartabat. Tiga kunci penting yang perlu dikembangkan dalam pembangunan Aceh baru selain reaktualisasi ruang publik adalah penguatan kelembagaan-kelembagaan tradisional, kelembagaan adat, ataupun lembaga agama juga merupakan bagian dari peta kekuatan identitas Aceh yang tidak dapat dianggap remeh. Tiga kekuatan *civil society* Aceh ini disadari atau tidak telah membentuk akar kesejarahan yang kuat di Aceh, sehingga bangunan sosial dan kultural ini meskipun pernah mengalami keretakan pada saat konflik Aceh, kini faktanya masih mampu bertahan dan bahkan kini sedang dihidupkan dan dilekatkan kembali sebagai agenda pembangunan Aceh baru, yaitu Aceh

yang lebih baik, kondusif, bermartabat, dan berdaulat. Oleh karena itu, Aceh harus berani menunjukkan daya kritis yang ideologis di tengah tantangan kultur global yang menguat, meskipun tidak perlu berhadapan secara ketat dengan globalisasi.

Harus disadari bahwa perkembangan Aceh tidak saja diciptakan oleh masyarakat Aceh sendiri. Meskipun globalisasi seringkali melewati batas-batas teritori kultural yang sudah ditentukan sebagai arena kontestasi dalam masyarakat, pelibatan global juga pada batas tertentu mewariskan pengembangan Aceh akan isu-isu dan agenda strategis. Oleh karena itu, apa yang menjadi komitmen dari awal dalam studi ini selalu ditekankan perlunya negosiasi antara lokal dengan global, di mana juga penting adanya formulasi-formulasi yang diciptakan kedua belah pihak agar menemukan keseimbangan antar berbagai kepentingan. Di antaranya adalah *pertama*, setidaknya menggambarkan kecenderungan adanya keberpihakan global pada kekuatan-kekuatan lokal. *Kedua*, begitu sebaliknya kekuatan-kekuatan lokal harus mampu menggambarkan dukungan penuh pada kekuatan-kekuatan global yang akan membangun bersama-sama menuju perubahan lokal yang dinamis. *Ketiga*, mampu memberi akses selebar-lebarnya pada kedua kepentingan untuk sebuah perubahan lokal yang terus dilekatkan pada kedaulatan lokal, baik berbasis pada adat istiadat, agama maupun, kearifan lokal. Dengan demikian transformasi identitas keacehan yang diagendakan tidak keluar begitu saja dari aspek-aspek lokalitas keacehan.

Penggambaran kesimpulan di atas sekaligus rekomendasi bagi para aktor, baik aktor budaya, ekonomi, dan politik, terutama para agen globalisasi dan pembuat kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional atau pemerintah untuk agenda pembangunan aceh kedepan yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- \_\_\_\_\_. 2007. Potret Retak Komunalisme: Aceh sebagai Field of study kebudayaan, artikel disampaikan pada. *Wednesday Forum CRCS* pada Rabu, 2007
- Ali, Fachri. 2006. *Interiorisasi dan Eksteriorisasi: Refleksi Sejarah Sosial Politik Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Anthony Cohen, 2000. *Discriminating Relations: identity, Boundary and Authenticity*, in Cohen A.P (ed) *Signifying Identities*, London Routledge.
- Alfred Schutz. *The Phenomenology of the social world*. Northwestern University Press, 1967, hal 31-32
- Appadurai, Arjun. 1994. "Global Ethnoscapes: Note and Queries for Transnational Anthropology" dalam R.G. Fox (ed) *Recapturing Anthropology: working in the Present*, Santa fe, NM. School of American Research Press.
- Ardana, I Ketut. 2004. "Kesadaran Kolektif Lokal dan Identitas Nasional dalam Proses Globalisasi" dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (ed). *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Bali: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press
- Aspinall, Edward. 2009. *Islam and Nation. Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford California: Stanford University Press.
- Barth, Fredrik. 2000. *Boundaries and connection*, in Cohen. A.P (ed). *Signifying and identities*. London: Routledge.
- Berger L. Petter and Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (New York: 1966)
- Bustamam-ahmad, Kamaruzzaman. 2009. *The Discourse of the Islamic State and Islamic Law in Malaysia*" dalam *Asian Transformation in Actions* (Tokyo: Noippon Foundation, 2009)

- \_\_\_\_\_. 2012. *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Cohen, Anthony. 2000. Discriminating Relation: Identity, Boundary, and Authenticity, in Cohen.A.P (ed) *signifying Identity*, Londong: Routledge.
- Edelman. Marc. 2001. Social Movement: Changing Paradigms and Forms of Politics, *Annual Review of Anthropology*, Vol. 30. PP. 285-317
- Featherstone, Mike (ed), *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*. London: Sage Publication
- Friedmen, Jonathan. 1991. Being in the World; Globalization and Localization" Dalam Mike Fatherstone (ed) *Global culture; Nationalism, Globalization, and Modernity*. London: Sage publication.
- Geertz, Clifford., 1983. *Local Knowledge*. New York: Basic Book.
- Hall, Stuart, 1991. The Local and Global: Globalization and Ethnicity; Old and new Identity, Old and new Ethnicity, dalam Anthony D. King (ed) *Culture, Globalization and the World System*. London: Macmillan.
- \_\_\_\_\_, 1996. "Who Needs Identity?" In Hall and du Gay, P (ed). *Question of Cultural Identity*. London. Sage Publication
- \_\_\_\_\_, 2003. Cultural Identity and Diaspora. Dalam Jonathan Rutherford (ed), *Identity: community, Culture, and Difference*. London: lawrence and wishard
- Hardiman, Budi. 2010. *Ruang Publik. Melacak Partisipasi Demokrasi, dari Polis sampai Cyberspace* Yogyakarta: Kanisius.
- Harris, Marvin. 1980. *Cultural Materialism, The strangle for Science of Culture*. New York: Vintages Books.
- Hurgronje, C. Snouck. 1906. *The Acehnese*. Leyden: Late E. J. Brill
- \_\_\_\_\_, 1996. Aceh: Rakyat dan Adat Istiadat
- Mujib, Ibnu. 2009. Pergeseran Ruang Politik, sebuah Catatan Etnografis Aceh, *Serambi News*, 19 Mei.
- Sen, Amartya. 2006. *Identity and Violence*. Londong: pinguin Books.
- Reid, Anthony. 2006. *Verendah of Violence, The Background of the Aceh Problem*. Singapore: NUS Press.